



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Rabu 05 Februari 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI

Plt Bupati Keluarkan SE Tangguhkan ODL di Luar Daerah

SIDOARJO (RM) - Demi memastikan keselamatan peserta didik, Plt Bupati Sidoarjo, Subandi, resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait aturan pelaksanaan Out Door Learning (ODL).

Dalam SE ini, sekolah-sekolah di Sidoarjo diwajibkan menanggulkan kegiatan ODL di luar wilayah kabupaten Sidoarjo hingga batas waktu yang belum ditentukan.

S E b e r a n o r 400.3/1308/438.5.1/2025 itu diterbitkan pada 3 Februari 2025 dan ditujukan kepada seluruh sekolah baik negeri maupun swasta. Kebijakan ini mencakup jenjang PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs, hingga pendidikan nonformal di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam SE tersebut, ada beberapa ketentuan penting yang harus dipatuhi oleh sekolah dalam melaksanakan kegiatan ODL, pertama, jenis ODL yang diatur dalam SE ini mencakup berbagai aktivitas seperti studi lapangan, perkemahan, tinggal bersama masyarakat, karya wisata, magang, belajar di alam terbuka, hingga persiapan sekolah.

Kedua, ODL dibatasi. ODL hanya boleh dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan yang direncanakan di luar daerah wajib ditanggulkan. Ketiga, persyaratan administratif. Sekolah yang ingin mengadakan ODL wajib mengajukan proposal paling lambat dua minggu sebelum keberangkatan.

Selain itu, harus menyertakan surat permohonan serta dokumen kelayakan kendaraan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo. Dan keempat, Faktor Keselamatan Prioritas Utama.

Keputusan ini tak lepas dari rentetan musibah yang menimpa pelajar dalam kegiatan ODL. Pada akhir Januari 2025, tragedi kegiatan ODL menimpa murid SMPN 7 Mojokerto yang hanyut di Pantai Duri, Gunung Kidul, Yogyakarta, menyebabkan empat siswa meninggal, termasuk satu anak asal Kecamatan Krian, Sidoarjo.

Tak beresung lura, pada 1 Februari 2025, kecelakaan bus di Jod Pundari-Malang menewenggat siswa seorang siswa SMAN 1 Pongor. Dua peristiwa meruiku ini memuat Plt Bupati Subandi merasa perlu beresngak cepat untuk menanggulkan kegiatan serupa terulang.

"Kara ingin memastikan proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan kondusif bagi anak-anak. Kami tidak ingin ada korban lagi," tegas Subandi.

Ia juga mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap peserta didik. SE ini berlaku hingga ada kebijakan baru yang menggantikan.

"Kami meminta semua sekolah untuk mematuhi aturan ini. Keselamatan siswa adalah prioritas utama," pungkasnya.

Dengan adanya SE ini diharapkan kegiatan ODL tetap bisa menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan tanpa mengorbankan keselamatan siswa. (ud)



Elpiji 3 Kilo Mulai Langka di Sidoarjo

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Kelangkaan elpiji ukuran 3 kilogram, terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Kelangkaan ini sudah dirasakan oleh pedagang di tingkat pangkalan sejak akhir Januari lalu. Menurut mereka, kelangkaan elpiji ukuran tiga kilogram merupakan dampak dari libur panjang pada akhir bulan lalu.

Pada hari libur panjang dan hari Minggu, pihak Pertamina tidak melakukan pengiriman ke agen maupun pangkalan. Padahal, setiap harinya para pedagang di tingkat pangkalan harus memenuhi kebutuhan warga yang mencapai 100 hingga 300 tabung per hari.

Ironisnya, dalam beberapa hari terakhir, para pedagang di pangkalan hanya mendapatkan pasokan elpiji yang jauh lebih sedikit dibandingkan permulaannya. Akibatnya, hanya dalam waktu sekitar satu jam, seluruh tabung yang baru tiba di pangkalan langsung habis terjual kepada warga.

"Pasokan yang datang ke pangkalan saya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan warga. Tabung-tabung ini hanya bertahan sebentar, karena banyak yang membutuhkan," ungkap Hando, seorang pedagang pangkalan elpiji.

Hal yang sama dialami Sunarto, pedagang pangkalan elpiji di kawasan Desa Magersari, Kecamatan Sidoarjo. Di tokonya, stok elpiji 3 kilogram juga mulai menipis.

Sunarto menjelaskan bahwa ketentuan pembatasan penjualan elpiji hingga tingkat pengecer sudah diterapkan sejak lama. Untuk mengatasi masalah kelangkaan ini, ia berinisiatif mendaftarkan identitas setiap warga pengguna elpiji 3 kilogram ke pihak Pertamina.

"Saya daftarkan identitas warga yang membeli elpiji agar mereka tetap bisa mendapatkan pasokan meski stoknya kurang," Cetus Sunarto.

Namun, ia juga menyayangkan kebijakan Pertamina yang membatasi pembelian elpiji ukuran 3 kilogram hanya 5 tabung per bulan. Menurutnya, kebutuhan warga bervariasi, sehingga pembatasan ini dirasa tidak cukup.

Para pedagang di tingkat pengecer berharap agar Pertamina segera mencukupi kebutuhan elpiji ukuran 3 kilogram. Apalagi, jelang bulan Ramadan pada Maret mendatang, permintaan elpiji biasanya meningkat tajam di kalangan warga.

Kelangkaan ini diharapkan segera teratasi agar kebutuhan masyarakat terhadap elpiji 3 kilogram dapat terpenuhi tanpa kendala. (catrus)



Pemkab Sidoarjo Cover Pekerja Rentan dengan BPJS Ketenagakerjaan



SIDOARJO | Suaralintasindonesia.com -Pemkab Sidoarjo kembali mencover pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ada 13.395 orang yang diproteksi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersebut. Setahun ke depan, mereka mendapatkan perlindungan jaminan sosial di dua program. Yakni Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK dan Jaminan Kematian/JKM.

Pemkab Sidoarjo melaunching sekaligus mensosialisasikan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Sidoarjo. Acara digelar di Hotel Aston Sidoarjo, Selasa, (4/2).

Beberapa perwakilan petani, nelayan serta guru PAUD dan pekerja rentan lainnya di Sidoarjo dihadirkan dalam kegiatan tersebut. Launching dilakukan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sidoarjo bersama Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, perwakilan Biro Perencanaan Pemprov Jatim dan Pps. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sidoarjo, M. Ainur Rahman yang hadir mewakili Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi

88 Persen Daging Sapi di Sidoarjo Terindikasi Gelonggong, Berbahaya bagi Kesehatan

Editor: Fathur Roziq 5 Februari 2025 06:31

Data Tiap Pasar

Pasar	Gelonggong	Tidak Gelonggong
Larangan	10	3
Sukodono	3	2
Taman	10	7
Ciandungan	3	2
Krian	12	2
Porong	16	2

Data Hasil

Dari data disamping didapat hasil sebagai berikut:

88,9% Terindikasi Gelonggong

11,1% Tidak Terindikasi Gelonggong

Dari 18 sample anak yang diuji TPC

100 Hasil Uji melebihi ambang batas total mikroba yang ada pada daging segar

ketik.co.id

Hasil survei Disaperta Sidoarjo yang menyebut sebagian besar daging sapi yang beredar di Kabupaten Sidoarjo terindikasi hasil gelonggong. (Sumber: Disaperta Sidoarjo)

Siswa SMPN 1 Krian Sidoarjo, DM ke Bupati Subandi Akibat ODL Ditanggulkan

Wiwid Teguh - Rabu, 5 Februari 2025 | 06:27 WIB

1rham 46 menit

ayo a pak becabud e tuwas njalok duwek ayah ku gawe mbyar wingi

Balas Lihat terjemahan

cakband1 33 menit • Pembuat

@1rham sabar yaa lee 😊😊

Balas

DM salah satu siswa dijawab langsung Cakband! (Foto: tangkapan layar)

Sidoarjo, Cakrawala.co - Pelaksanaan Outdoor Learning (ODL) ditanggulkan sesuai dengan Surat Edaran (SE) 400.3/1308/438.5.1/2025 itu diterbitkan pada 3 Februari 2025. Ramai di jagat maya, para siswa langsung Direct Message (DM) di akun Instagram resmi Plt Bupati Sidoarjo, Subandi.

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Sidoarjo Cover Pekerja Rentan dengan BPJS Ketenagakerjaan

© Heri Margo · 4 Februari 2025 · 0



SIDOARJO | [Suaralintasindonesia.com](https://suaralintasindonesia.com) -Pemkab Sidoarjo kembali mencover pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ada 13.395 orang yang diproteksi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersebut. Setahun ke depan, mereka mendapatkan perlindungan jaminan sosial di dua program. Yakni Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK dan Jaminan Kematian/JKM.

Pemkab Sidoarjo melaunching sekaligus mensosialisasikan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Sidoarjo. Acara digelar di Hotel Aston Sidoarjo, Selasa, (4/2).

Beberapa perwakilan petani, nelayan serta guru PAUD dan pekerja rentan lainnya di Sidoarjo dihadirkan dalam kegiatan tersebut.

Launching dilakukan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sidoarjo bersama Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, perwakilan Biro Perekonomian Pemprov Jatim dan Pps.Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sidoarjo, M.Ainur Rahman yang hadir mewakili Plt.Bupati Sidoarjo H.Subandi mengatakan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara menjadi salah satu tugas negara. Hal itu diwujudkan Pemkab Sidoarjo dengan memberikan perlindungan iaminan sosial Ketenagakeriaan kepada pekeria rentan di Kabupaten Sidoario.



Mereka akan mendapatkan proteksi dan manfaat apabila terjadi kecelakaan kerja. Bahkan pemerintah melalui badan penyelenggaraan jaminan sosial Ketenagakerjaan akan memberikan santunan dan bea siswa pendidikan apabila terjadi kematian.

“Kami pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan jaminan seandainya bapak ibu nanti terjadi sesuatu diluar kemampuan kita, itu tujuannya, bukan berarti kami mendoakan itu terjadi, tetap doa terbaik bagi bapak ibu semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT,” ucapnya.

M. Ainur Rahman mengatakan perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu program unggulan Kabupaten Sidoarjo. Namun Universal Coverage Jamsostek/UCJ di Kabupaten Sidoarjo masih 38 persen.

Pemkab Sidoarjo sendiri menargetkan tahun 2025 ini 65 persen pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo terlindung program jaminan sosial Ketenagakerjaan.

“Ini bukan tugas yang ringan tetapi bagi saya tidak ada sesuatu yang berat kalau kita semua punya komitmen yang sama, ayo saling bahu membahu, ayo saling berkolaborasi sehingga niat mulia pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada semua pekerja di Sidoarjo ini bisa terwujud dengan kekompakan dan kerjasama kita,” ajaknya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo, Ainun Amalia merinci ada sebanyak 8.630 orang petani, 856 orang nelayan serta 2.920 orang guru PAUD dan 989 pekerja rentan lainnya yang tahun ini mendapatkan perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan.

Mulai bulan Januari sampai Desember 2025 mereka aktif sebagai peserta program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya kepersertaan mereka dicover setiap tiga bulan sekali. Program jaminan sosial Ketenagakerjaan itu sendiri murni bersumber dari DBHCHT Tahun Anggaran 2025.

“Kami bersyukur bahwa tahun 2025 ini cakupan perlindungan Jaminan social ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di Sidoarjo ini mencapai 13.395 orang,” ucapnya.

Ainun mengatakan program perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan tersebut diprioritaskan kepada pekerja rentan terhadap kemiskinan dan rentan terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sidoarjo.

Manfaatnya adalah memberikan kenyamanan dan ketenangan para penerima program dalam melakukan aktivitasnya.

Oleh karenanya ia ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial di Kabupaten Sidoarjo.

“Khususnya kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo yang telah memberikan support dan dukungan bagi program perlindungan pekerja rentan ini sehingga bisa berjalan dengan baik, termasuk tim koordinasi DBHCHT Kabupaten Sidoarjo yang bersatu dan bersemangat untuk menggolkan pelaksanaan perlindungan jaminan sosial di Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2025 ini,” tutupnya. (Hr)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Siswa SMPN 1 Krian Sidoarjo, DM ke Bupati Subandi Akibat ODL Ditangguhkan

Wiwid Teguh - Rabu, 5 Februari 2025 | 06:27 WIB



1rcham 46 menit

ayo a pak kebacut e tuwas njalok duwek ayah ku gawe mbayar wingi



1

Balas Lihat terjemahan



cakband1 33 menit • Pembuat

@1rcham sabar yaa lee 😊😊



1

Balas

DM salah satu siswa dijawab langsung Cakband1 (Foto : tangkapan layar)

Sidoarjo, Cakrawala.co - Pelaksanaan Outdoor Learning (ODL) ditangguhkan sesuai dengan Surat Edaran (SE) 400.3/1308/438.5.1/2025 itu diterbitkan pada 3 Februari 2025. Ramai di jagat maya, para siswa langsung Direct Message (DM) di akun Instagram resmi Plt Bupati Sidoarjo, Subandi.



Berikut ini DM salah satu pelajar **SMPN 1 Krian**, Sidoarjo :

"Pak Subandi tolonggg ya kita dari Snika tetap terdepan ingin ODL plis izinkan kita pak. Kita perlu hiling kasihan pak yang sudah berharap ternyata dibatalkan"

"Selamat sore Pak, kenapa tidak jadi ODL Pak, padahal nanti malam sudah mau berangkat. Gak apa-apa setelah itu tidak ada ODL, plis Pak ini yang terakhir Pak"

Baca Juga:

Kades Desa Suruh Suwono Pastikan 3 Singkal Masih Aman Tidak Hilang

"Uang jajan sudah, baju sudah, koper sudah, siap otw, tapi malah kenapa mendadak batal. Pak kenapa kenapa mendadak tidak dari bulan lalu saja kita jadi sedih"



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Ubur-ubur ikan lele Bapak nyakitin kita lee. Selama perjalanan kita juga pasti berdoa, setiap orang juga ada nasibnya sendiri-sendiri"

"Ayo Pak Kebacut e tuwas njalok duwek Ayah ku gawe mbayar ODL wingi"

Dari beberapa DM yang masuk di DM akun Cakbandi, ada yang dijawab langsung oleh Pimpinan Sidoarjo. "Sabar yaa leee"

Menanggapi hal tersebut beberapa pelajar di Sidoarjo mengaku kecewa lantaran ODL selain untuk kegiatan belajar juga sebagai kegiatan kenang-kenangan terakhir Bersama teman-teman 9 SMP.



Wakil Bupati LIRA Sidoarjo, Moh Helmi (Foto : ist)

"Ayah saya ada study tour di jamanya, Kakak saya juga ada kegiatan perpindahan di SMP dengan teman-temannya. Sekarang di tahun 2025 dilarang ODL, tidak ada kenangan-kenangan gak asik," Ujar Intan salah satu siswa SMPN di Krian.

Menanggapi hal itu Wakil Bupati LIRA Sidoarjo, Moh Helmi setuju dengan langkah yang diambil Bupati Subandi, ODL ditanggihkan. "Yang kuatir dan gelisah adalah Emak-Emak tidak setuju dengan adanya ODL. Orangtua takut dengan adanya kecelakaan yang menimpah siswa di Mojokerto dan Sidoarjo," Ujar Helmi kepada cakrawala.co

Wakil Bupati LIRA Sidoarjo memberikan saran ke Dinas Pendidikan Sidoarjo, ODL bisa diganti di dalam Kabupaten Sidoarjo. Seperti kegiatan menanam pohon bekerjasama dengan Dinas Pertanian, bersih-bersih selokan air di lingkungan sekolah.

"ODL cukup dilakukan di sekitar sekolah saja, tidak perlu jauh-jauh karena untuk mendapatkan ilmu atau belajar bisa dilakukan di dekat lingkungan sekolah." tutup Moh Helmi

Seperti diketahui demi memastikan keselamatan peserta didik, Plt Bupati Sidoarjo, Subandi, resmi mengeluarkan Surat Edaran terkait aturan pelaksanaan Outdoor Learning. Dalam SE ini, sekolah-sekolah di Sidoarjo diwajibkan menanggihkan kegiatan ODL di luar wilayah kabupaten Sidoarjo hingga batas waktu yang belum ditentukan.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

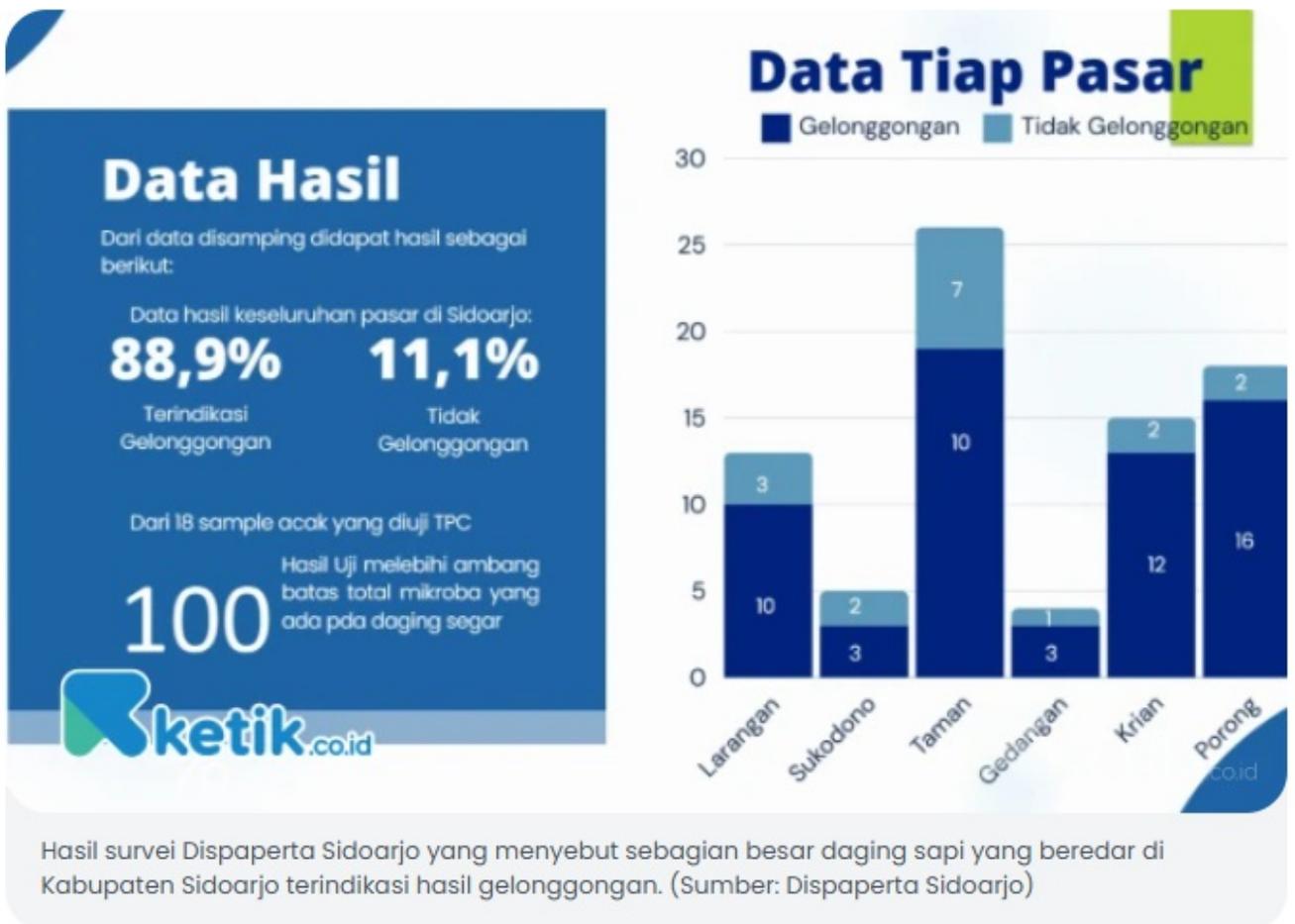
SE bernomor 400.3/1308/438.5.1/2025 itu diterbitkan pada 3 Februari 2025 dan ditujukan kepada seluruh sekolah baik negeri maupun swasta. Kebijakan ini mencakup jenjang PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs, hingga pendidikan nonformal di Kabupaten Sidoarjo.



88 Persen Daging Sapi di Sidoarjo Terindikasi Gelonggongan, Berbahaya bagi Kesehatan

Editor: Fathur Roziq

5 Februari 2025 06:31





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KETIK, SIDOARJO – Sebagian besar daging sapi yang beredar di pasar-pasar Kabupaten Sidoarjo terindikasi kuat merupakan hasil gelonggongan. Padahal, daging sapi gelonggongan membahayakan kesehatan saat dikonsumsi. Mengandung mikroba dan bersifat racun. Menggelonggong hukumnya haram.

Kepala Bidang Produksi Peternakan Dispaperta Sidoarjo drh Tony Hartono menyatakan, Dinas Pangan dan Pertanian (Dispaperta) Kabupaten Sidoarjo telah menyurvei 5 pasar besari di Sidoarjo. Masing-masing Pasar Sidoarjo, Pasar Taman, Pasar Krian, Pasar Gedangan, dan Pasar Porong. Apa hasilnya?

“Sekitar 88 persen daging sapi di lima pasar itu merupakan hasil gelonggongan. Lima pasar tersebut menjadi tolok ukur peredaran daging di Sidoarjo,” kata Tony Hartono pada Selasa (5 Februari 2025).

Padahal, lanjut Tony Hartono, daging gelonggongan berbahaya bagi kesehatan yang mengonsumsinya. Misalnya, mengandung mikroba yang bersifat racun. Berbahaya bagi tubuh manusia. Dagingnya pun lebih cepat membusuk. Tidak segar.

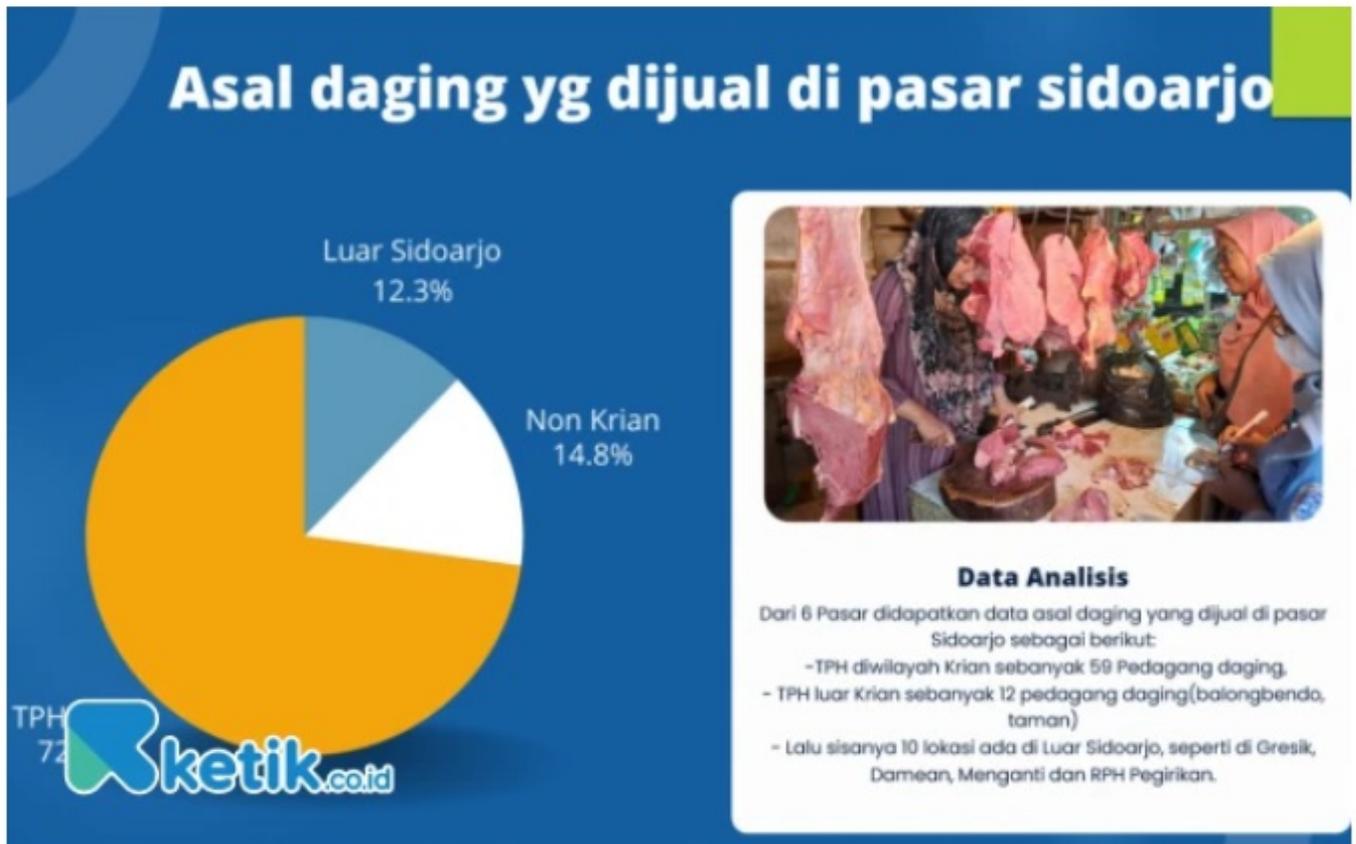
“MUI (Majelis Ulama Indonesia) tegas memfatwakan bahwa daging sapi hasil gelonggongan ini haram,” tegas Tony Hartono.

Dia menjelaskan, daging gelonggongan berasal dari sapi yang dipaksa meminum air sebanyak-banyaknya sebelum disembelih. Penggelonggong berniat meningkatkan berat badan sapi. Cari untung sebesar-besarnya. Mereka tidak peduli.



Padahal, kualitas daging gelonggongan itu turun. Kadar proteinnya rendah karena larut dalam air. Risikonya jelas dirasakan oleh konsumen. Apalagi air yang digunakan untuk menggolong sapi ternyata tidak higienis.

"Rawan sekali menjadi penyakit kalau salah pula saat mengolahnya," tambahnya.



Hasil penelusuran Dispaperta Sidoarjo yang menyebut asal daging sapi yang beredar di Kabupaten Sidoarjo bukan rumah potong hewan (RPH) resmi, melainkan TPH liar yang tidak memenuhi standar. (Sumber: Dispaperta Sidoarjo)

Tony Hartono menjelaskan, Dispaperta Sidoarjo juga telah menelusuri asal-muasal daging sapi gelonggongan yang beredar di 5 pasar besar di Kabupaten Sidoarjo. Rata-rata berasal dari tempat pemotongan hewan (TPH) liar. Tidak resmi. Tidak higienis.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemotongan hewan liar itu tidak memenuhi persyaratan. Baik syarat hewannya, personalnya, sanitasi tempatnya, dan sebagainya. Karena itu tidak mendapatkan sertifikasi halal dan NKV (Nomor Kontrol Veteriner). Karena itu, jelas tidak memenuhi syarat dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Peredaran daging sapi gelonggongan ini menjadi perhatian penting Dispaperta Sidoarjo. Sebab, di Kabupaten Sidoarjo, banyak sekali produsen hasil olahan berbahan daging. Misalnya, pedagang pentol, pedagang bakso, sosis, dan lain-lainnya.



Plt Bupati Keluarkan SE Tanggihkan ODL di Luar Daerah

SIDOARJO (BM) - Demi memastikan keselamatan peserta didik, Plt Bupati Sidoarjo, Subandi, resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait aturan pelaksanaan Out Door Learning (ODL).

Dalam SE ini, sekolah-sekolah di Sidoarjo diwajibkan menanggihkan kegiatan ODL di luar wilayah kabupaten Sidoarjo hingga batas waktu yang belum ditentukan.

SE bernomor 400.3/1308/438.5.1/2025 itu diterbitkan pada 3 Februari 2025 dan ditujukan kepada seluruh sekolah baik negeri maupun swasta. Kebijakan ini mencakup jenjang PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs, hingga pendidikan nonformal di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam SE tersebut, ada beberapa ketentuan penting yang harus dipatuhi oleh sekolah dalam melaksanakan kegiatan ODL, pertama, jenis ODL yang diatur dalam SE ini mencakup berbagai aktivitas seperti studi lapangan, perkemahan, tinggal bersama masyarakat, karya wisata,

magang, belajar di alam terbuka, hingga perpindahan sekolah.

Kedua, ODL dibatasi. ODL hanya boleh dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan yang direncanakan di luar daerah wajib ditanggihkan. Ketiga, persyaratan administrative, Sekolah yang ingin mengadakan ODL wajib mengajukan proposal paling lambat dua minggu sebelum keberangkatan.

Selain itu, harus menyertakan surat permohonan serta dokumen kelayakan kendaraan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo. Dan keempat, Faktor Keselamatan Prioritas Utama

Keputusan ini tak lepas dari rentetan musibah yang menimpa pelajar dalam kegiatan ODL. Pada akhir Januari 2025, tragedi kegiatan ODL menimpa murid SMPN 7 Mojokerto yang hanyut di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta, menyebabkan empat siswa meninggal, termasuk satu anak asal Kecamatan Krian, Sidoarjo.

Tak berselang lama, pada 1 Februari 2025, kecelakaan bus di Tol Pandaan-Malang merenggut nyawa seorang siswi SMAN 1 Porong. Dua peristiwa memilukan ini membuat Plt Bupati Subandi merasa perlu bertindak cepat untuk mencegah kejadian serupa terulang.

"Kami ingin memastikan proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan kondusif bagi anak-anak. Kami tidak ingin ada korban lagi," tegas Subandi.

Ia juga mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap peserta didik. SE ini berlaku hingga ada kebijakan baru yang menggantikan. "Kami meminta semua sekolah untuk mentaati aturan ini. Keselamatan siswa adalah prioritas utama," pungkasnya.

Dengan adanya SE ini diharapkan kegiatan ODL tetap bisa menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan tanpa mengorbankan keselamatan siswa. (udi)



Plt Bupati Sidoarjo, Subandi

BM/ST



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

13.395



BM19T

JAMINAN KETENAGAKERJAAN: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan jaminan ketenagakerjaan kepada 13.395 orang pekerja rentan. Program itu, resmi diluncurkan dan disosialisasikan di Sidoarjo, Selasa (4/2).

13.395 Pekerja Rentan Mendapat BPJS Ketenagakerjaan Gratis

SIDOARJO (BM) - Para pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo mendapat fasilitas BPJS Ketenagakerjaan gratis. Asuransi itu di-cover oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

Terhitung ada 13.395 orang yang diproteksi program jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut. Rinciannya, terdiri dari 8.630 orang petani, 856 orang nelayan, 2.920 orang guru PAUD dan 989 pekerja rentan lainnya.

Setahun ke depan, mereka mendapatkan perlindungan jaminan sosial di dua program. Yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Program itu, resmi diluncurkan Pemkab Sidoarjo, sekaligus disosialisasikan pada Selasa (4/2). Kegiatan yang digelar di Hotel Aston Sidoarjo itu, juga dihadiri beberapa perwakilan petani, nelayan, guru PAUD dan pekerja rentan lainnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesjahteraan Rakyat Setda Sidoarjo, M. Hani, mengatakan, sebagai pemerintah, pemenuhan kebutuhan dasar warga negara menjadi salah satu tugas negara.

Hal itu diwujudkan Pemkab Sidoarjo dengan memberikan perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo.

"Mereka akan mendapatkan proteksi dan manfaat apabila terjadi kecelakaan kerja. Bahkan pemerintah melalui badan penyelenggaraan jaminan sosial Ketenagakerjaan akan memberikan santunan dan beasiswa pendidikan apabila terjadi kematian," ujarnya.

Menurut Ainur Rahman, perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo, menjadi salah satu program unggulan Kabupaten Sidoarjo.

Pemkab Sidoarjo, menargetkan tahun 2025 ini, 65 persen pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo terdorong program jaminan sosial Ketenagakerjaan.

"Ini bukan tugas yang ringan, tetapi bagi saya tidak ada sesuatu yang berat kalau kita semua punya komitmen yang sama. Ayo berkolaborasi, sehingga niat mulia pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada semua pekerja di Sidoarjo ini bisa terwujud dengan kekompakan dan kerja sama kita," aiaknya.

Manurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo, Ainun Amalia, 13.395 pekerja rentan itu mulai bulan Januari hingga Desember 2025 sudah aktif sebagai peserta program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, kepesertaan mereka di-cover setiap tiga bulan sekali. Program jaminan sosial Ketenagakerjaan itu, murni bersumber dari DBHCHT Tahun Anggaran 2025.

"Kami bersyukur, bahwa tahun 2025 ini cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di Sidoarjo, ini mencapai 13.395 orang," ucap Ainun.

Program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut, diprioritaskan kepada pekerja rentan terhadap kemiskinan dan rentan terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sidoarjo.

Manfaatnya, adalah memberikan kenyamanan dan ketenangan para penerima program dalam menjalankan pekerjaannya. Dan kami menyampaikan banyak terima kasih kepada para pihak yang turut bekerja sama dan memberikan dukungan bagi program perlindungan pekerja rentan ini, sehingga bisa berjalan dengan baik," ujarnya. (udi)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, R. Isalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

CS: Soan media@khs.com
 Hal itu diwujudkan Pemkab Sidoarjo dengan memberikan perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo.

Pemkab Cover Pekerja Rentan dengan BPJS Ketenagakerjaan

SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo kembali mencover pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ada 13.395 orang yang diproteksi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersebut.

Setahun ke depan, mereka mendapatkan perlindungan jaminan sosial di dua program. Yakni Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK dan Jaminan Kematian/JKM.

Pemkab Sidoarjo melaunching sekaligus mensosialisasikan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Sidoarjo. Acara digelar di Hotel Aston Sidoarjo, Selasa, (4/2/25).

Beberapa perwakilan petani, nelayan serta guru PAUD dan pekerja rentan lainnya di Sidoarjo dihadirkan dalam kegiatan tersebut.

Asisten Pemerintahan dan Kesjahteraan Rakyat Setda Sidoarjo M. Ainur Rahman yang hadir mewakili Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara menjadi salah satu tugas negara. Hal itu diwujudkan Pemkab Sidoarjo dengan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo.



Pemkab Sidoarjo melaunching sekaligus mensosialisasikan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pekerja rentan Sidoarjo, di Hotel Aston Sidoarjo, Selasa, (4/2).

"Mereka akan mendapatkan proteksi dan manfaat apabila terjadi kecelakaan kerja. Bahkan pemerintah melalui badan penyelenggaraan jaminan sosial Ketenagakerjaan akan memberikan santunan dan beasiswa pendidikan apabila terjadi kematian," ujar Ainur.

"Kami pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan jaminan seandainya bapak ibu nanti terjadi

sesuatu diluar kemampuan kita, itu tujuannya, bukan berarti kami mendoakan itu terjadi, tetap doa terbaik bagi bapak ibu semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT," ucapnya.

M. Ainur Rahman mengatakan perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu program unggulan

Kabupaten Sidoarjo. Namun Universal Coverage Jamsostek/UCJ di Kabupaten Sidoarjo masih 38 persen. Pemkab Sidoarjo sendiri menargetkan tahun 2025 ini 65 persen pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo terlindung program jaminan sosial Ketenagakerjaan.

"Ini bukan tugas yang ringan tetapi bagi saya tidak ada sesuatu yang berat kalau kita semua punya komitmen yang sama, ayo saling bahu membahu, ayo saling berkolaborasi sehingga niat mulia pemerintah untuk memeberikan jaminan sosial kepada semua pekerja di Sidoarjo ini bisa terwujud dengan kekompakan dan kerjasama kita," ajaknya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Ainun Amalia merinci ada sebanyak 8.630 orang petani, 856 orang nelayan serta 2.920 orang guru PAUD dan 989 pekerja rentan lainnya yang tahun ini mendapatkan perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan.

Mulai bulan Januari sampai Desember 2025 mereka aktif sebagai peserta program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya kepersertaan mereka dicover setiap tiga bulan sekali. Program jaminan sosial Ketenagakerjaan itu sendiri

murni bersumber dari DBH Tahun Anggaran 2025.

"Kami bersyukur bahwa tahun 2025 ini cakupan perlindungan, Jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja rentan di Sidoarjo mencapai 13.395 orang," ucapnya.

Ainun mengatakan perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan tersebut dioritikaskan kepada pekerja rentan terhadap kemiskinan dan rent terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sidoarjo.

Manfaatnya adalah memberikan kenyamanan dan ketenangan penerima program dalam melakukan aktivitasnya. Oleh karenanya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial di Kabupaten Sidoarjo.

"Khususnya kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo yang telah memberikan support dan dukungan bagi program perlindungan pekerja rentan ini sehingga bisa berjalan dengan baik, termasuk tim koordinasi DBHCHT Kabupaten Sidoarjo yang bersatu dan bersemangat untuk mengggolkan pelaksanaan perlindungan jaminan sosial di Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2025 ini," ucapnya. ● Loe



Sunarto, pedagang elpiji di depan warungnya.

Elpiji 3 Kilo Mulai Langka di Sidoarjo

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Kelangkaan elpiji ukuran 3 kilogram, terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Kelangkaan ini sudah dirasakan oleh pedagang di tingkat pangkalan sejak akhir Januari lalu. Menurut mereka, kelangkaan elpiji ini merupakan dampak dari libur panjang pada akhir bulan lalu.

Pada hari libur panjang dan hari Minggu, pihak Pertamina tidak melakukan pengiriman ke agen maupun pangkalan. Padahal, setiap harinya para pedagang di tingkat pangkalan harus memenuhi kebutuhan warga yang mencapai 100 hingga 300 tabung per hari.

Ironisnya, dalam beberapa hari terakhir, para pedagang di pangkalan hanya mendapatkan pasokan elpiji yang jauh lebih rendah dibandingkan permintaan konsumen. Akibatnya, hanya

dalam waktu sekitar satu jam, seluruh tabung yang baru tiba di pangkalan langsung habis terjual kepada warga.

"Pasokan yang datang ke pangkalan saya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan warga. Esalnya, tabung elpiji hanya bertahan sebentar, karena banyak yang membutuhkan," ungkap Handoko, seorang pedagang pangkalan elpiji.

Hal yang sama dialami Sunarto, pedagang pangkalan elpiji di kawasan Desa Magersari, Kecamatan Sidoarjo. Di tokonya, stok elpiji 3 kilogram juga mulai menipis.

Sunarto menjelaskan bahwa ketentuan pembatasan penjualan elpiji hingga tingkat pengecer sudah diterapkan sejak lama. Untuk mengatasi masalah kelangkaan ini, ia berinisiatif mendaftarkan identitas setiap warga pengguna elpiji 3 kilogram ke pihak Pertamina.

"Saya daftarkan identitas warga yang membeli elpiji agar mereka tetap bisa mendapatkan pasokan meski stoknya kurang," Cetus Sunarto.

Namun, ia juga menyayangkan kebijakan Pertamina yang membatasi pembelian elpiji ukuran 3 kilogram hanya 5 tabung per bulan. Menurutnya, kebutuhan warga bervariasi, sehingga pembatasan ini dirasa tidak cukup.

Para pedagang di tingkat pengecer berharap agar Pertamina segera mencukupi kebutuhan elpiji ukuran 3 kilogram. Apalagi, jelang bulan Ramadan pada Maret mendatang, permintaan elpiji biasanya meningkat tajam di kalangan warga.

Kelangkaan ini diharapkan segera teratasi agar kebutuhan masyarakat terhadap elpiji 3 kilogram dapat terpenuhi tanpa kendala. (cat/rus)



ANTISIPASI: Penyembelihan daging di Tempat Pemotongan Hewan Krian.

Dispaperta: 88 Persen Daging di Pasar Ternyata Gelonggongan

Dinas Pangan dan Pertanian (Dispaperta) Sidoarjo menemukan bahwa sebagian besar daging yang dijual di pasar tradisional merupakan daging gelonggongan. Temuan ini berdasarkan survei yang dilakukan di lima pasar besar di Kria Delta

FENOMENA

“KAMI melakukan survei di lima pasar besar Sidoarjo, yaitu Krian, Larangan, Gedangan, Porong, dan Taman. Dari hasil pengambilan sampel, 88 persen daging yang dijual merupakan daging gelonggongan,” ujar Kabid Produksi Peternakan Dispaperta Sidoarjo, Tony Hartono, saat ditemui Radar Sidoarjo, Selasa (4/2).

Tony menjelaskan bahwa daging gelonggongan berasal dari

Muncul Buaya, Petambak di Jabon Terancam Gagal Panen

JABON-Seekor buaya muara berukuran sedang masuk ke tambak milik warga di Dusun Tlocor, Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon. Keberadaan predator tersebut membuat pemilik tambak terancam gagal panen ikan dan kepiting, dengan kerugian yang ditaksir mencapai Rp 20 juta.

Tambak seluas 90 x 40 meter milik Ratimin ini berisi ikan nila, bandeng, serta kepiting yang seharusnya sudah siap panen. Namun, karena kemunculan buaya tersebut, proses panen terhambat.

"Seharusnya, sekarang sudah waktunya panen kepiting, tapi kami masih be-



DIMONITOR: Tim dari Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Satuan Kerja (Satker) Surabaya berupaya mengevakuasi buaya.

lum bisa karena takut ada buaya," ujar Agus, arak pemilik tambak, Selasa (4/1).

Agus menjelaskan, panen kepiting dan ikan biasanya dilakukan dengan masuk

langsung ke area tambak. Namun, keberadaan buaya membuatnya khawatir akan keselamatannya.

Akibatnya, ia harus menelan kerugian hingga puluhan juta rupiah. Selain ancaman gagal panen, jumlah ikan dan kepiting yang dibudidayakan juga berkurang karena dimakan buaya atau mati.

"Kerugian sekitar Rp 20 juta lebih. Sebelumnya, tambak ini sudah diisi udang lima rean, kepiting lima kuintal, ikan bandeng dua ribu ekor, dan ikan nila," jelasnya.

Agus mengungkapkan, ia biasanya tidur di sebuah gubuk di tengah tambak

● Ke Halaman 10



piting, tapi kami masih be-

milik tambak, Selasa (4/1).

dilakukan dengan

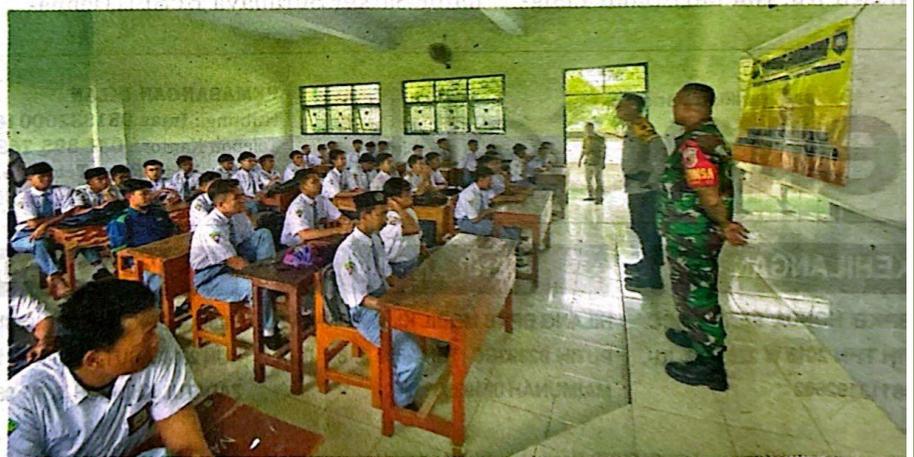
Antisipasi Tawuran, Polisi dan TNI di Krembung Gelar Program Wayang Pandawa

KREMBUNG-Polisi dan TNI mendatangi SMKI Rejeni, Kecamatan Krembung, Sidoarjo, untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswi sekolah tersebut. Kegiatan ini bertujuan mengantisipasi pengaruh negatif kenakalan remaja, mulai dari perundungan hingga tawuran.

Kapolsek Krembung, AKP Nanang Mulyono, mengungkapkan bahwa kedatangan polisi dan TNI ke sekolah merupakan langkah awal dalam mencegah kenakalan remaja.

Edukasi ini diberikan agar para pelajar tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, seperti tawuran, perundungan, hingga penyalahgunaan narkoba.

● Ke Halaman 10



PENCEGAHAN: Polisi dan TNI memberikan edukasi ke siswa sekolah di wilayah Kecamatan Krembung.

Scanned with CamScanner





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Disparta: 88 Persen...

sapi yang diberi minum secara berlebihan sebelum disembelih. Tujuannya adalah menambah berat daging agar pedagang mendapatkan keuntungan lebih besar.

"Praktik ini menurunkan kualitas daging karena protein ikut larut bersama air yang keluar. Selain itu, daging gelongsongan lebih cepat busuk dan beresiko bagi kesehatan konsumen, terutama jika air yang digunakan tidak higienis," jelasnya.

Menurut Tony, pengawasan terhadap pemotongan sapi gelongsongan

masih menjadi tantangan. Hal ini karena praktik tersebut sering dilakukan di luar daerah, seperti Gresik, untuk menghindari razia.

"Saat kami melakukan sidak ke Tempat Pemotongan Hewan (TPH), sering kali tidak ditemukan aktivitas pemotongan sapi gelongsongan. Namun, setelah sidak selesai, praktik tersebut kembali dilakukan secara diam-diam," terangnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah terus berupaya mengedukasi masyarakat. Konsumen di pasar diberi pemahaman tentang bahaya daging gelongsongan serta cara memilih

daging yang berkualitas.

Selain edukasi, pemerintah juga memperkuat regulasi terkait produk hewan. Salah satunya adalah kebijakan kewajiban sertifikasi halal yang mulai diberlakukan pada 17 Oktober 2024.

"Pemerintah telah menetapkan regulasi bahwa produk-produk hewan harus memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Ini merupakan syarat untuk memastikan keamanan daging sebelum dipasarkan," tegas Tony.

Tony menyebut bahwa masih ada sumber daging yang terjamin kualitas-

nya di Sidoarjo. Ia menyarankan masyarakat membeli daging dari tempat yang terpercaya atau di supermarket yang telah memenuhi standar kesehatan dan kehalalan.

"Kalau di supermarket, dagingnya sudah pasti halal karena ada standar yang harus dipenuhi," katanya. Selain itu, masyarakat juga perlu mengenali ciri-ciri daging gelongsongan. Salah satu cara membedakannya adalah dengan memperhatikan teksturnya yang lebih lembek dan berair dibandingkan daging ber-

kualitas baik. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan permintaan terhadap daging berkualitas semakin tinggi. Jika konsumen lebih selektif, pedagang pun akan terdorong untuk menjual daging yang sehat dan meninggalkan praktik pemotongan gelongsongan.

"Kehalalan dan kualitas daging sangat penting. Karena itu, kami pada 2024 akan lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat," tutup Tony. (sai/vga)



Antisipasi Tawuran,...

"Kami memberikan edukasi kepada pelajar di wilayah Krembung agar tidak terlibat dalam kenakalan remaja. Ini sekaligus menjadi upaya pencegahan terhadap perundungan dan tawuran di kalangan siswa," ujarnya.

PROGRAM WAYANG PANDAWA UNTUK REMAJA

Nanang menjelaskan bahwa Koramil dan Polsek Krembung memiliki program bernama Wayae Nyangkruk Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa (Wayang Pandawa). Program ini bertujuan memberikan penyuluhan kepada remaja agar tidak terjerumus dalam aksi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama di wilayah Kecamatan Krembung.

"Kegiatan ini dilakukan agar kami bisa lebih dekat dengan remaja dan mahasiswa. Dengan begitu, kami dapat mengantisipasi mereka dari tindakan kenakalan remaja," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa program ini akan dilaksanakan secara rutin di berbagai sekolah di Krembung. Polisi dan TNI akan turun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi kepada para siswa.

Selain itu, pihaknya juga mengajak orang tua dan sekolah untuk berperan aktif dalam membimbing anak-anak mereka dengan nilai-nilai positif, baik dari segi agama, pendidikan, maupun moral.

"Kami berharap dengan keterlibatan semua pihak, termasuk orang tua dan sekolah, remaja bisa tumbuh menjadi generasi yang lebih baik dan tidak terjerumus dalam kenakalan remaja," pungkas Nanang. (gun/vga)



KEPALA BIRO/PEMIMPIN REDAKSI: Vega Dwi Arista. STAF REDAKSI: D bulan. TARIF IKLAN: Display Full Colour Rp 65.000/mm kolom, Black White R TELEPON: (031) 58280826, Email: radarsidoarjo@gmail.com SURABAY 53699523 FAX: (021) 53661854 PENERBIT: PT Radar Media Surabaya. P





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Muncul Buaya...

saat malam hari untuk mengawasi tambaknya. Namun, sejak munculnya buaya, ia tidak berani lagi bermalam di sana. "Biasanya kalau malam saya tidur di sini gusuk, tapi sekarang tidak berani. Kemarin buaya sempat tertangkap, tapi berhasil lepas," katanya. Sementara itu, tim dari Balai Peng-

elolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Satuan Kerja (Satker) Surabaya masih belum melakukan upaya evakuasi kembali setelah sebelumnya gagal menangkap buaya tersebut.

"Untuk hari ini, Selasa (4/1), upaya penangkapan masih dianda karena kami ada kegiatan lain," ujar Koordinator Satker Surabaya BPSPL Denpa-

sar, Suwardi.

Ia menambahkan bahwa upaya penangkapan akan kembali dilanjutkan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, pemilik tambak diimbau untuk sementara menutup area tambak dari aktivitas pemancingan maupun pencaharian kepiting. "Kami masih mendiskusikan langkah selanjutnya dengan tim," tandasnya. (dik/vga)



Sidoarjo

Jawa Pos METROPOLIS RABU 5 FEBRUARI



KERETA API LOKAL: Penumpang hendak naik Commuter Line Jenggolo di Stasiun Boharan, Sidoarjo, kemarin (4/2).

Stasiun Boharan dan Kedinding Layani Ratusan Penumpang

Tiga Hari Dibuka setelah Lima Tahun Tidak Aktif

SIDOARJO - Dibukanya kembali Stasiun Boharan, Krian, dan Stasiun Kedinding, Tarik, mendapat sambutan positif meski belum banyak penumpang yang dilayani. Tiga hari beroperasi, dua stasiun yang tidak aktif selama lima tahun itu menjadi akses naik dan turun lebih dari 100 penumpang.

Humas Balai Teknik Perkereta-

sejak dibuka pada 1 Februari, Stasiun Kedinding melayani 43 penumpang yang hendak bepergian. Lalu, ada 20 penumpang yang turun. "Kereta yang melewati Kedinding dan Boharan ini KA lokal semua," katanya.

Sementara itu, di Stasiun Boharan tercatat ada 47 penumpang yang berangkat dan 32 penumpang yang datang atau turun.

Menurut Vecga, pada tahap awal pelayanan stasiun aktif kembali, ada tiga kereta api yang berhenti di dua stasiun tersebut. Yakni, Commuter Line (CL) Dhoho, CL

tuk antusiasme masyarakat pada hari pertama dan kedua cukup tinggi, tiket terjual lumayan banyak," ungkapnya.

Hal itu tidak lepas dari sosialisasi yang dilakukan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) dan Kereta Commuter Indonesia (KCI) di media sosial maupun dengan memasang banner di lokasi sekitar stasiun.

Pengaktifan kembali dua stasiun itu berasal dari aspirasi warga sekitar, pemerhati transportasi, serta komunitas pecinta kereta api di wilayah Sidoarjo. "Harapannya bisa membantu mobilitas warga dengan

Jawa Pos



SUDAH
DIVAKSIN:
Ali Akbar,
peternak
sapi di Desa
Beclrongengor,
Wonoayu,
mengawasi
35 ekor sapi
miliknya
kemarin (4/2).

ANGGER BONDAN/JAWA POS

Vaksinasi PMK Tahap Dua, Siapkan 7.500 Dosis

SIDOARJO - Persebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kota Delta mengalami kenaikan meski tidak drastis. Bulan ini vaksinasi kembali digenjut dengan menyiapkan 7.500 dosis.

Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo drh Tony Hartono mengakui adanya kenaikan jumlah hewan ternak yang terjangkit. Namun, jumlahnya bisa dihitung dengan pasti. Artinya, virus PMK di Sidoarjo terkendali.

Saat ini total kasus sakit di Sidoarjo sebanyak 153 ekor. Sebanyak 17 di antaranya harus dipotong paksa dan 9 ekor mati. Jumlah kasus hanya naik 6 dari dua pekan sebelumnya. "Terbilang stabil," katanya.

Tony mengatakan, timnya secara intensif melakukan pengawasan dan mendata seluruh peternak yang ternaknya terjangkit PMK. Ternak yang terjangkit harus dikarantina. Pihaknya juga mendistribusikan bantuan vitamin dan disinfektan ke peternak. Tidak ketinggalan, upaya vak-

sinasi. "Vaksinasi tahap 1 ada 3.500 dosis yang diberikan selama Januari," katanya.

Pada 10 Februari mendatang, Sidoarjo bakal mendapatkan pasokan vaksin untuk vaksinasi tahap 2. "Kami dapat lagi 7.500 dosis untuk yang Februari," katanya.

Dia menegaskan, meski upaya vaksinasi digenjut, pembatasan tetap dilakukan. "Aturannya masih sama, keluar masuk hewan harus menyertakan surat keterangan kesehatan hewan," tegasnya. (uzi/fal)

Jawa Pos

Harga Maksimal Rp 19 Ribu

► Prabowo Izinkan Pengecer Jual Gas Elpiji 3 Kg

JAKARTA, SURYA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahilil Lahadalla menegaskan, harga elpiji 3 kilogram (kg) di masyarakat seharusnya tidak lebih dari Rp 15.000 per tabung. Namun, kenyataannya di lapangan, harga gas bersubsidi itu bisa mencapai Rp 25.000 hingga Rp 30.000 per tabung. "Harga kami minta, tidak boleh lebih dari Rp 19.000. Maksimal Rp 19.000, sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi). Ini kami akan lakukan terus-menerus," ucap Bahilil di sebuah pangkalan gas wilayah Kota Tangerang, Selasa (4/2).

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memutuskan untuk menaikkan status warung eceran menjadi subpangkalan gas agar lebih mudah dimonitoring.

Bahilil menekankan, tingginya harga jual di warung eceran potensi besar menggagalkan rencana pemerintah untuk memberikan



SURYA/MOHAMMAD ROMACHOH

DISTRIBUSI - Sugiati menata pasokan elpiji 3 KG dari agen di pangkalan miliknya di Jalan Raya Ijen, Lingkungan Banjaranyar, Kelurahan Wates, Magersari, Kota Mojokerto, Selasa (4/2).

subsidi gas secara tepat sasaran. "Kita harus fair untuk memperbaiki, tapi juga diakui kan bahwa ada yang menyalahgunakan subsidi yang harus kita perbaiki, yaitu yang paling penting," ucap Bahilil.

Sebelumnya, penjualan gas 3 kg melalui pengecer tidak diperbolehkan lagi mulai 1 Februari. Pengecer yang ingin tetap menjual elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau sub-penyualur resmi Pertamina.

STORY HIGHLIGHTS

- Sub pangkalan wajib pakai aplikasi MAP Pertamina
- Pertamina harap tidak ada panic buying
- Jusuf Kalla beri masukan ke pemerintah

Pengecer yang ingin menjadi pangkalan bisa mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi ini membuat gas 3 kg menjadi langka di pasar.

Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengecer dapat kembali berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. "Sudah mulai hari ini (pengecer boleh jual). Dinaikkan statusnya menjadi subpangkalan," ucap Bahilil.

Bahilil mengatakan, para sub pangkalan akan dibekali aplikasi dari Pertamina. Aplikasi yang ternyata MAP itu digunakan agar pemerintah tetap bisa mengontrol harga elpiji 3 kg di masyarakat. Merencanakan kita fasilitasi

■ KE HALAMAN 11

Kebijakan Setengah Matang

PEMERINTAH BARU-baru ini menerapkan kebijakan pembelian LPG 3 kg hanya di pangkalan resmi. Tujuannya, seperti yang diklaim, untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Namun, alih-alih meningkatkan efektivitas distribusi, kebijakan ini justru menimbulkan persoalan baru di lapangan. Masyarakat kesulitan mendapatkan elpiji, pengecer kecil kehilangan mata pencaharian, dan harga di tingkat konsumen justru mengalami kenaikan akibat keterbatasan akses. Tak butuh waktu lama, gelombang protes dari berbagai lapisan masyarakat akhirnya membuat pemerintah membatalkan kebijakan



NEWS ANALYSIS

A HALIM MAHFUDZ
PENGASUH PESANTREN SALAFIYAH
SEBUK JOMBANG

LPG langsung di pangkalan, melainkan melalui pengecer yang lebih mudah diakses. Pengecer ini berperan penting dalam rantai distribusi, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari pangkalan atau tidak memiliki waktu untuk mengantri. Ketika pemerintah membatasi distribusi hanya di pangkalan, efeknya langsung terasa: masyarakat kesulitan ini. Seperti banyak kebijakan lain yang terburu-buru tanpa kajian mendalam, keputusan ini mengulangi pola yang sama: regulasi dibuat tanpa mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, baru setelah terjadi keresahan publik, pemerintah mundur dengan dalih "evaluasi." Di banyak daerah, masyarakat tidak membeli

■ KE HALAMAN 11

KORBAN BANJIR BANDANG BUTUH LOGISTIK

Banjir bandang yang melanda Desa Wonoboyo, Kecamatan Klambang, Bondowoso tak hanya memrak-porandakan 37 rumah warga di delapan RT, Senin (3/2) sekitar pukul 23.01 WIB. Banyak barang-barang berharga milik warga rusak akibat terendam banjir.

HALAMAN
4



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SURYA LINES

11 RABU, 5 FEBRUARI 2025 | SURYA

Harga...

■ DARI HALAMAN 1

tasi dengan IT, supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol, supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak terjadi lagi," kata Bahllil.

Sebagai tambahan informasi, terdapat sekitar 370 ribu pengecer di seluruh Indonesia yang terdaftar di Pertamina, telah otomatis dijadikan sub pangkalan.

Dengan status sebagai sub pangkalan, kini para pengecer bisa kembali menjual elpiji 3 kg. Langkah itu diambil Bahllil setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepadanya agar pengecer atau warung kelontong bisa kembali menjual elpiji 3 kg.

Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu mengaku dua kali ditelepon Prabowo soal masalah elpiji 3 kg. Setelah ditelepon Prabowo, Bahllil mengatakan bahwa aturan soal elpiji 3 kg diubah. "Sekarang kita ubah aturan ya, atas perintah Pak Presiden saya baru ditelepon tadi pagi dan malam. Kami diarahkan, pertama memastikan elpiji ini benar-benar sasaran dan

subsidi tepat sasaran, harganya harus terjangkau," ujar Bahllil.

Para pengecer elpiji 3 kilogram (kg) yang kini berstatus sub pangkalan diwajibkan mengunduh dan menggunakan aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP) milik Pertamina.

Aplikasi tersebut sebelumnya sudah dipakai oleh para pangkalan yang menjual elpiji 3 kg. Kini, dengan para pengecer yang berstatus sub pangkalan, mereka diwajibkan melakukan hal serupa. Dengan aplikasi MAP, para pengecer diminta melaporkan transaksi penjualan elpiji 3 kg yang mereka lakukan.

"Jadi kan itu MAP-nya kan sekarang sudah dipakai sama oleh pangkalan-pangkalan resmi kan. Ya itu nanti tinggal disosialisasikan ke sub pangkalan, download, nanti bisa report di situ," kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso di Palmarah, Jakarta Barat, Selasa (4/2).

Dengan diubahnya ketentuan, di mana masyarakat bisa kembali membeli elpiji 3 kg di pengecer, Fadjar berharap tidak ada "panic buying". Masyarakat diimbau tidak panik dan membeli

elpiji 3 kg seperlunya saja. "Kami imbau juga masyarakat tidak perlu panik, jadi cukup beli seperlunya. Sub pangkalan juga yang baru mendapatkan kenaikan [statusnya dari pengecer] ini juga bisa membeli ya secara normalnya saja seperti hari biasa," ujar Fadjar.

JK beri masukan

Bahllil menuturkannya, dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla. Dalam pertemuan tersebut salah satu yang dibahas yakni masalah LPG 3 Kg.

JK memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah terkait penataan LPG 3 Kg. "Ya Pak JK ngomong tentang LPG bahwa LPG ini terjadi di saat kebijakan beliau Menjadi Wakil Presiden di periode pertama," kata Bahllil.

Menurut Bahllil dalam pertemuan tersebut JK mengatakan subsidi gas elpiji tidak ada perubahan sejak lama. Sistem subsidi yang dilakukan pemerintah sekarang ini masih sama saat nilai tukar masih Rp 8.000 rupiah per dollar. "Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan disaat itu kurs dolar kata Pak JK masih Rp

8 ribu. Sekarang sudah Rp 16 ribu," katanya.

Menurut Bahllil, JK setuju dengan penataan distribusi gas elpiji yang dilakukan pemerintah sekarang ini. Tujuannya agar subsidi tepat sasaran. "Ya Pak JK menyampaikan bahwa Penataan itu penting. Penataan itu penting. Sekarang ini pengecer yang tadinya pengecer kita jadikan menjadi Subpangkalan," pungkasnya.

Untuk diketahui konversi minyak tanah ke gas elpiji

3 Kg terjadi pada masa era pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK).

JK berhasil mengkonversi penggunaan minyak tanah ke elpiji yang programnya digalakan pada 2007 silam. Program konversi tersebut berlangsung kurang lebih tiga tahun yakni hingga 2010. Selama program konversi tersebut 44,6 juta tabung didistribusikan ke masyarakat.

Ketua Umum Partai Golkar

ini lantas menjelaskan alur distribusi elpiji. Biasanya, elpiji 3 kg dijual dari Pertamina ke agen berkisar Rp 12.000-Rp 13.000. Kemudian, harga elpiji dari agen ke pangkalan berkisar Rp 17.000. Distribusi dan kenaikan harga itu dapat dikendalikan oleh Pertamina. "Dari agen ke pangkalan harganya itu kurang lebih sekitar Rp 16.000 atau Rp 17.000. Nah sekarang itu masih bisa dikendalikan oleh Pertamina, masih bisa dipantau," katanya.

Sementara harga elpiji di pangkalan ke pengecer itu, kata Bahllil, sulit dikendalikan Pertamina. Oleh karenanya, ada pengecer yang menjual elpiji hingga Rp 30.000. "Di pangkalan ke pengecer, itu situ yang susah Pertamina kendalikan, enggak ada instrumennya dan itulah harga terjadi sampai dengan di atas Rp 20.000. Bahkan ada yang Rp 30.000, kadang kadang bahkan, ada yang dioplos," terangnya. (tribunews.com/kompas.com)

Kebijakan...

■ DARI HALAMAN 1

mendapatkan LPG karena jumlah pangkalan terbatas dan jaraknya tidak selalu dekat. Bagi mereka yang bekerja sehari-hari, membeli LPG di pangkalan menjadi tantangan tersendiri.

Tak hanya itu, kebijakan ini juga mematikan mata pencaharian ribuan pengecer kecil. Mereka yang selama ini menggantungkan hidup dari menjual LPG 3 kg tiba-tiba kehilangan sumber pendapatan. Pemerintah seakan mengabaikan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan ini.

BBM subsidi, justru yang terjadi adalah lonjakan harga di pasar gelap, penumpukan di SPBU, dan keresahan di masyarakat.

Perbaiki sistem

Jika pemerintah serius ingin memastikan LPG bersubsidi hanya untuk masyarakat miskin, solusinya bukan dengan melarang pengecer, melainkan dengan menciptakan mekanisme kontrol yang lebih efektif. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:

1. Sistem digital berbasis NIK atau kartu khusus subsidi
2. Pengawasan ketat tingkat distributor

benar ingin meningkatkan efektivitas subsidi, maka kebijakan yang diambil harus berbasis data, diuji coba terlebih dahulu, dan memiliki sistem kontrol yang jelas. Larangan yang dibuat tanpa solusi alternatif hanya akan menimbulkan masalah baru dan berujung pada penolakan masyarakat.

Pemerintah harus belajar dari pengalaman ini agar tidak terus mengulang kesalahan yang sama. Jika tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memastikan subsidi tepat sasaran, maka pertanyaannya adalah: apakah dengan menghapus pengecer, LPG 3 kg benar-benar hanya dinikmati oleh masyarakat

mekanisme kontrol yang lebih efektif. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:

1. Sistem digital berbasis NIK atau kartu khusus subsidi
2. Pengawasan ketat tingkat distributor

SURYA

LANGGANAN & IKLAN

Jl. Raya Tebel no.12, Tebel Tengah, Gedangan

Telp: 031-58298825

rediasidoarjo@gmail.com

www.sidoarjo.go.id

www.sidoarjo.go.id

Kupang Lontong

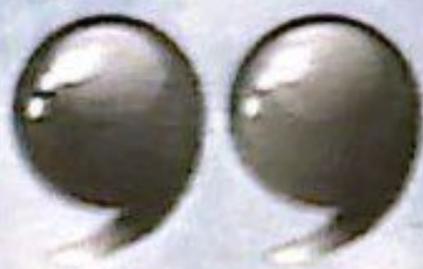
Mlebu alas dikiter kucing, mlayu banter nabrak pager

Neng pasar tuku daging, lek milih sing seger

RABU, 5 FEBRUARI 2025

Pengecer Tetap Bisa Beli LPG di Pangkalan

DI tengah kebijakan pemerintah yang membatasi penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer, kondisi di Sidoarjo justru berbeda. Pemkab Sidoarjo memastikan bahwa pengecer masih dapat membeli langsung dari pangkalan tanpa hambatan.



Tidak ada masalah apapun di Sidoarjo. Para pengecer bisa langsung membeli LPG di pangkalan. Saya sudah mengonfirmasi hal ini ke Pertamina.”

Listyaningsih
Kabid Perdagangan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
(Disperindag) Sidoarjo.

Kabid
Perda-
gangan
Dinas
Perindu-
strian
dan
Perda-
gangan
(Dis-
perin-
dag)
Sidoarjo,
Listya-
ningsih,
mene-
gaskan
bahwa
distri-
busi
LPG 3

kg di wilayahnya berjalan lancar dan tidak ada kendala berarti.

“Tidak ada masalah apapun di Sidoarjo. Para pengecer bisa langsung membeli LPG di pangkalan. Saya sudah mengonfirmasi hal ini ke Pertamina,” ujarnya kepada *Radar Sidoarjo*, Selasa (4/2).

Listyaningsih menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu mengantre panjang di pangkalan karena pengecer tetap diperbolehkan membeli dan menjual LPG ke warga. “Tidak ada antrean panjang. Yang datang ke pangkalan bukan masyarakat, melainkan pengecer,” jelasnya.

Ia juga memastikan bahwa stok LPG 3 kg di Sidoarjo dalam kondisi aman. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak panik atau khawatir akan ketersediaan gas subsidi tersebut.

Namun, ada syarat yang harus dipenuhi bagi pengecer yang ingin membeli LPG di pangkalan. Setiap pembeli diwajibkan menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat utama. “Syarat pembelian cukup menunjukkan KTP,” pungkasnya. (sai/vga)